



BADAN PUSAT STATISTIK

FP - KPA

FORMULIR PEMBERITAHUAN

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI

Judul kegiatan:

Kompilasi Data untuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

Identitas rekomendasi (diisi oleh BPS):

Judul Kegiatan

Tuliskan dengan lengkap judul kegiatan yang akan dilaksanakan.

Blok I. Identifikasi Penyelenggara Kompilasi Produk Administrasi

1.1. Penyelenggara

Tuliskan nama instansi pemerintah (kementerian/lembaga non kementerian/dinas/satuan kerja perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota) penyelenggara kegiatan setingkat eselon II.

Contoh:

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1.2. Alamat lengkap penyelenggara

Tuliskan dengan lengkap alamat instansi pemerintah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan *e-mail*).

Contoh:

Alamat lengkap : Jl. Jend. Sudirman Kav. 69,
penyelenggara Telp: 021-7398381-89
~~Kabupaten~~/kota : Jakarta Selatan
Provinsi : DKI Jakarta

Blok II. Penanggung Jawab Kompilasi Produk Administrasi (sebagai *Contact Person*)

2.1. Penanggung Jawab Kegiatan

- a) Penanggung jawab kegiatan adalah pihak yang mengetahui informasi tentang kompilasi produk administrasi yang diselenggarakan.
- b) Tuliskan dengan lengkap nama, jabatan, alamat, nomor telepon, faksimile, dan *e-mail* penanggung jawab kegiatan di instansi penyelenggara kegiatan.

2.2. Penanggung Jawab Teknis Kegiatan

- a) Penanggung jawab teknis kegiatan adalah pihak yang menjadi koordinator teknis penyelenggaraan kegiatan. Penanggung jawab teknis kegiatan bisa pegawai instansi bersangkutan atau pihak ketiga (konsultan).
- b) Tuliskan dengan lengkap nama, jabatan, alamat, nomor telepon, faksimile, dan *e-mail* penanggung jawab teknis kegiatan.

Blok III. Perencanaan dan Persiapan Kompilasi Produk Administrasi

3.1. Tujuan dan manfaat kegiatan

Tuliskan dengan ringkas tujuan dan manfaat penyelenggaraan kegiatan.

3.2. Jadwal kegiatan

Tuliskan dengan lengkap tanggal, bulan, dan tahun penyelenggaraan kegiatan, meliputi perencanaan/persiapan, pengumpulan data, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Blok I. Identifikasi Penyelenggara Kompilasi Produk Administrasi

1.1. Penyelenggara : Bagian Pemerintahan Setda kabupaten Trenggalek

1.2. Alamat lengkap penyelenggara : Jl. A. Yani No. 1

Kabupaten/~~Kota~~ *) : Trenggalek

Provinsi : Jawa Timur

Blok II. Penanggung Jawab Kompilasi Produk Administrasi (sebagai *Contact Person*)

2.1. Penanggung jawab kegiatan:

Nama : Drs. Joko Susanto

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan

Alamat : Jl. A. Yani No. 1 Trenggalek

Telepon : 081234004050 Fax: -

E-mail : -

2.2. Penanggung jawab teknis kegiatan:

Nama : Nina indriawati, S.STP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah

Alamat : Jl. A. Yani No. 1 Trenggalek

Telepon : 085336757178 Fax: -

E-mail : ninaindriawati@gmail.com

Blok III. Perencanaan dan Persiapan Kompilasi Produk Administrasi

3.1. Tujuan dan manfaat kegiatan:

Untuk memenuhi kebutuhan data LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

3.2. Jadwal kegiatan:

	Tanggal	Bulan	Tahun		Tanggal	Bulan	Tahun
Perencanaan/persiapan	0 1	0 1	2 0 2 1	s.d.	1 0	0 1	2 0 2 1
Pengumpulan data	1 1	0 1	2 0 2 1	s.d.	1 1	0 2	2 0 2 1
Pengolahan	1 2	0 2	2 0 2 1	s.d.	0 5	0 3	2 0 2 1
Analisis	0 6	0 3	2 0 2 1	s.d.	2 0	0 3	2 0 2 1
Diseminasi	2 1	0 3	2 0 2 1	s.d.	3 1	0 3	2 0 2 1

Blok IV. Variabel Utama yang Digunakan

Kolom (1) Nomor

Tuliskan nomor secara berurutan sebanyak variabel utama yang digunakan.

Kolom (2) Nama

Tuliskan nama variabel utama yang digunakan.

Kolom (3) Referensi Waktu

Tuliskan referensi waktu dari variabel utama yang digunakan.

Kolom (4) Sumber

Tuliskan unit kerja yang menjadi sumber data dari variabel utama yang digunakan.

Blok V. Desain Kompilasi Produk Administrasi

5.1. Kegiatan ini dilakukan

- a) Lingkari kode 1 jika kegiatan dilakukan hanya sekali.
- b) Lingkari kode 2 jika kegiatan dilakukan berulang kali atau kegiatan rutin.

5.2. Frekuensi penyelenggaraan kegiatan

- a) Frekuensi penyelenggaraan kegiatan adalah periode pelaksanaan kegiatan.
- b) Frekuensi penyelenggaraan kegiatan diisi hanya jika kode 2 pada rincian 5.1 (R.5.1) dilingkari.
- c) Lingkari kode sesuai dengan frekuensi penyelenggaraan kegiatan.

5.3. Jenis data

Lingkari kode sesuai jenis data yang dikompilasi.

Series adalah data yang terdiri dari beberapa periode waktu, seperti harian, bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Cross Section adalah data yang terdiri dari beberapa item yang berkaitan pada suatu waktu (satu waktu saja, tidak seperti data *series* yang terdiri dari beberapa periode waktu).

Series dan Cross Section adalah data gabungan antara data *series* dengan data *cross section*, yaitu terdiri atas beberapa objek/sub objek dalam beberapa periode waktu

5.4. Metode pengumpulan data

Lingkari semua metode pengumpulan data yang digunakan dalam kompilasi (*multiple choice*).

Mengisi kuesioner sendiri (swacacah) adalah metode pengumpulan data dimana penyedia data mengisi kuesioner/form/lembar kerja yang disediakan oleh kompilator secara mandiri. Metode ini termasuk pengisian melalui aplikasi dan form yang dikirim melalui email.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dari dokumen registrasi/pencatatan baik dokumen fisik maupun elektronik dari laporan penyedia data maupun hasil pencarian kompilator.

Lainnya adalah metode pengumpulan data selain mengisi kuesioner sendiri dan dokumentasi.

Blok IV. Variabel Utama yang Digunakan

Variabel utama yang digunakan, referensi waktu dan sumber dari masing-masing variabel tersebut.

No.	Nama	Referensi Waktu	Sumber
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat/sedang belajar di satuan PAUD	2020	Dinas Dikpora
2	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	2020	Dinas Dukcapil
3	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	2020	Dinas Dikpora
4	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2020	Dinas Dikpora
5	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2020	Dinas Dikpora
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	2020	Dinas Dikpora
7	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	2020	Dinas Dikpora
8	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	2020	Dinas Dikpora
9	Jumlah kepala sekolah (PAUD Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	2020	Dinas Dikpora
10	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat/sedang belajar di sekolah dasar	2020	Dinas Dikpora
11	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	2020	Dinas Dukcapil
12	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	2020	Dinas Dikpora
13	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2020	Dinas Dikpora
14	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2020	Dinas Dikpora
15	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2020	Dinas Dikpora
16	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2020	Dinas Dikpora
17	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2020	Dinas Dikpora
18	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2020	Dinas Dikpora
19	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2020	

20	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2020	Dinas Dikpora
21	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2020	sda
22	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2020	sda
23	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2020	sda
24	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2020	sda
25	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2020	sda
26	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2020	sda
27	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	2020	sda
28	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	2020	sda
29	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2020	sda
30	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2020	sda
31	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	2020	sda
32	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	2020	Dinas Dukcapil
33	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	2020	Dinas Dikpora
34	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2020	sda
35	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2020	sda
36	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2020	sda
37	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2020	sda
38	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2020	sda
39	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2020	sda
40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2020	sda

41	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2020	sda
42	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	2020	sda
43	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	2020	sda
44	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	2020	sda
45	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	2020	sda
46	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2020	sda
47	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2020	sda
48	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	2020	sda
49	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	2020	sda
50	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2020	sda
51	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2020	sda
52	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	2020	sda
53	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar menengah pada kabupaten yang bersangkutan	2020	sda
54	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	2020	sda
55	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2020	sda
56	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2020	sda
57	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	2020	sda
58	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	2020	sda
59	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	2020	sda
60	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	2020	sda
61	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	2020	sda

62	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	2020	Dinkes Dalduk KB
63	Jumlah penduduk di kabupaten	2020	Dinas Dukcapil
64	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2020	Dinkes Dalduk KB
65	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	2020	sda
67	Jumlah RS di kabupaten	2020	sda
68	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2020	sda
69	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2020	sda
70	Jumlah ibu hamil di kabupaten	2020	sda
71	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	2020	sda
72	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	2020	sda
73	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	2020	sda
74	Jumlah ibu bersalin di kabupaten	2020	sda
75	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2020	sda
76	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	2020	sda
77	Jumlah bayi yang baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	2020	sda
78	Jumlah bayi baru lahir di kabupaten	2020	sda
79	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2020	sda
80	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	2020	sda
81	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	2020	sda
82	Jumlah balita di kabupaten	2020	sda
83	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2020	sda
84	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	2020	sda
85	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	2020	sda
86	Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten	2020	sda
87	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2020	sda
88	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	2020	sda
89	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	2020	sda
90	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten	2020	Dinas Dukcapil
91	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2020	Dinkes Dalduk KB
92	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2020	sda
93	Jumlah warga Negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	2020	sda

94	Jumlah warga Negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten	2020	Dinas Dukcapil
95	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2020	Dinkes Dalduk KB
96	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2020	sda
97	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2020	sda
98	Jumlah penderita hipertensi di kabupaten	2020	sda
99	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2020	sda
100	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2020	sda
101	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2020	sda
102	Jumlah penderita DM di kabupaten	2020	sda
103	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2020	sda
104	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2020	sda
105	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2020	sda
106	Jumlah penderita ODGJ di kabupaten	2020	sda
107	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2020	sda
108	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2020	sda
109	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2020	sda
110	Jumlah penderita TBC di kabupaten	2020	sda
111	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2020	sda
112	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2020	sda
113	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	2020	sda
114	Jumlah dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten	2020	sda
115	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	2020	sda
116	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2020	sda
117	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	2020	PUPR
118	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota		PUPR
119	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		PUPR
120	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		PUPR
121	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		PUPR
122	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		PUPR

123	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		PUPR
124	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		PUPR
125	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota		PUPR
126	<i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		PUPR
127	<i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)</i>		PUPR
128	<i>Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha),direhabilitasi (ha),dioperasi dan pelihara (ha)</i>		PUPR
129	<i>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota</i>		PUPR
130	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		PUPR
131	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		PUPR
132	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		PUPR
133	Jumlah komulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota		PKPLH
134	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		PKPLH
135	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota		PKPLH
136	Tersusun dan nditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota		PKPLH
137	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM		PKPLH
138	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		PKPLH
139	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		PKPLH
140	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD		PKPLH
141	Jumlah rumah di kabupaten./kota		PKPLH
142	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		PKPLH
143	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		PKPLH
144	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		PKPLH
145	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		PKPLH

146	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		PKPLH
147	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		PKPLH
148	Kinerja penyediaan pelayanan SPALDS akses dasar		PKPLH
149	Kinerja penyediaan pelayanan SPALDS akses aman		PKPLH
150	Kinerja penyediaan pelayanan SPALDT akses aman		PKPLH
151	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		PKPLH
152	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		PKPLH
153	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja		PKPLH
154	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD		PKPLH
155	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		PKPLH
156	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya		DPMPTSP
157	Jumlah IMB yang berlaku		DPMPTSP
158	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		DPMPTSP
159	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		DPMPTSP
160	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung		
161	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		
162	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		
163	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		
164	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		Bakeuda
165	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap (kondisi baik dan sedang)		PUPR
166	Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota		PUPR
167	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota		PUPR
168	Panjang jalan yang dibangun		PUPR
169	Panjang jembatan yg dibangun		PUPR
170	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		PUPR
171	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		PUPR
172	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		PUPR
173	Panjang jembatan yang direhabilitasi		PUPR
174	Panjang jalan yang dipelihara		PUPR
175	Panjang jembatan yang dipelihara		PUPR
176	<i>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</i>		

177	<i>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota</i>		
178	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		
179	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		
180	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		
181	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		
182	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		
183	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		
184	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		
185	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		
186	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		
187	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya		
188	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis		
189	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		
190	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		
191	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		
192	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
193	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		
194	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan		

	segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
195	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		
196	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		
197	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		
198	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		
199	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		
200	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
201	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		
202	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
203	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		
204	Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		
205	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n		PKPLH
206	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n		PKPLH
207	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		PKPLH
208	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		PKPLH
209	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		PKPLH
210	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		PKPLH
211	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		PKPLH
212	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		PKPLH
213	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		PKPLH
214	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		PKPLH
215	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		PKPLH
216	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+ rumah yang penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni		PKPLH
217	Jumlah total rumah tangga terkenne relokasi program pemerintah daerah		PKPLH

218	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		PKPLH
219	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		PKPLH
220	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		PKPLH
221	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		PKPLH
222	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		PKPLH
223	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		PKPLH
224	Luas kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani		PKPLH
225	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha		PKPLH
226	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		PKPLH
227	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		PKPLH
228	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		PKPLH
229	Jumlah unit rumah tidak layak huni		PKPLH
230	Jumlah total unit rumah kabupaten/kota		PKPLH
231	Jumlah rumah di kab/kota		PKPLH
232	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH		PKPLH
233	Jumlah rumah tidak layak huni		PKPLH
234	Jumlah rumah yang tidak dihuni		PKPLH
235	Rasio rumah dan KK		PKPLH
236	Jumlah rumah pembangunan baru		PKPLH
237	Jumlah unit rumah yabng sedang dibangun terfasilitasi PSU		PKPLH
238	Jumlah unit rumah kab/kota		PKPLH
239	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		PKPLH
240	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		PKPLH
241	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		PKPLH
242	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		PKPLH
243	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		PKPLH
244	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		PKPLH
245	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		PKPLH
246	Jumlah pengembang yang teregistrasi		PKPLH

247	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		PKPLH
248	Jumlah pengaduan yang ditangani		Satpol PPK
249	Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		Satpol PPK
250	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		Satpol PPK
251	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Satpol PPK
252	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Satpol PPK
253	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Satpol PPK
254	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		Satpol PPK
255	Tersedianya sarana prasarana minimal		Satpol PPK
256	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan		Satpol PPK
257	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		Satpol PPK
258	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		BPBD
259	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal		BPBD
260	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		BPBD
261	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		BPBD
262	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal		BPBD
263	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal		BPBD
264	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan		BPBD
265	Persentase warga negara yang ikut pelatihan		BPBD
266	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana		BPBD
267	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		BPBD
268	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		BPBD
269	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		BPBD
270	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		BPBD
271	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		BPBD
272	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		BPBD
273	Jumlah layanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan		Satpol PPK

	kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan DINas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah		
274	Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota		Satpol PPK
275	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		Satpol PPK
276	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Satpol PPK
277	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Satpol PPK
278	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Satpol PPK
279	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Satpol PPK
280	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Satpol PPK
281	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		Satpol PPK
282	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		Satpol PPK
283	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		Dinsos P3A
284	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		Dinsos P3A
285	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		Dinsos P3A
286	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		Dinsos P3A
287	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Dinsos P3A
288	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		Dinsos P3A
289	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		Dinsos P3A
290	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		Dinsos P3A
291	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		Dinsos P3A
292	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		Dinsos P3A

293	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		Dinsos P3A
294	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		Dinsos P3A
295	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia		Dinsos P3A
296	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		Dinsos P3A
297	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		Dinsos P3A
298	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		Dinsos P3A
299	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		Dinsos P3A
300	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		Dinsos P3A
301	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		Dinsos P3A
302	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		Dinsos P3A
303	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Dinsos P3A
304	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Dinsos P3A
305	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		Dinsos P3A
306	Jumlah korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran		Dinsos P3A
307	Populasi korban bencana alam dan sopsial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota		Dinsos P3A
308	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		Dinsos P3A
309	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Dinsos P3A
310	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Dinsos P3A
311	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Dinsos P3A
312	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Dinsos P3A
313	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		Dinsos P3A

314	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD		Dinas Perinaker
315	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota		Dinas Perinaker
316	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.		Dinas Perinaker
317	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		Dinas Perinaker
318	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		Dinas Perinaker
319	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi		Dinas Perinaker
320	Jumlah tenaga kerja keseluruhan		Dinas Perinaker
321	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster		Dinas Perinaker
322	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		Dinas Perinaker
323	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		Dinas Perinaker
324	Persentase LPK yang terakreditasi		Dinas Perinaker
325	Persentase LPK yang memiliki perizinan		Dinas Perinaker
326	Jumlah penganggur yang dilatih		Dinas Perinaker
327	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan		Dinas Perinaker
328	Persentase penyerapan lulusan		Dinas Perinaker
329	Lulusan bersertifikat kompetensi		Dinas Perinaker
330	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan		Dinas Perinaker
331	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		Dinas Perinaker
332	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)		BPS
333	Jumlah tenaga kerja		Dinas Perinaker
334	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		Dinas Perinaker
335	Data tingkat produktivitas total		Dinas Perinaker
336	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		Dinas Perinaker
337	Jumlah perusahaan		Dinas Perinaker
338	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		Dinas Perinaker
339	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		Dinas Perinaker
340	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		Dinas Perinaker
341	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah		Dinas Perinaker
342	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		Dinas Perinaker
343	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		Dinas Perinaker
344	Jumlah mogok kerja		Dinas Perinaker

345	Jumlah penutupan perusahaan		Dinas Perinaker
347	Jumlah perselisihan kepentingan		Dinas Perinaker
348	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		Dinas Perinaker
349	Jumlah perselisihan PHK		Dinas Perinaker
350	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		Dinas Perinaker
351	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		Dinas Perinaker
352	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		Dinas Perinaker
353	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		Dinas Perinaker
354	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan		Dinas Perinaker
355	Jumlah pencari kerja yang terdaftar		Dinas Perinaker
356	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		Dinas Perinaker
357	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		Dinas Perinaker
358	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		Dinas Perinaker
359	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		Dinas Perinaker
360	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Dinas Perinaker
361	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		Dinas Perinaker
362	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota		Dinas Perinaker
363	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		Dinas Perinaker
364	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Dinas Perinaker
365	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Dinas Perinaker
366	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan		Dinas Perinaker
367	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		Dinas Perinaker
368	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya		Dinas Perinaker
369	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk		Dinas Perinaker
370	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD		Dinsos P3A
371	Jumlah seluruh belanja langsung di APBD		Bakeuda

372	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		Dinsos P3A
373	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		Dinsos P3A
374	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan		Dinsos P3A
375	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)		Dispenduk Capil
376	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		Dinsos P3A
377	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		Dinsos P3A
378	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		Dinsos P3A
379	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		Dinsos P3A
380	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		Dinsos P3A
381	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan		Dinsos P3A
382	Jumlah penduduk perempuan		Dispenduk Capil
383	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		Dinsos P3A
384	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		Dinsos P3A
385	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		Dinsos P3A
386	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		Dinsos P3A
387	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Dinsos P3A
388	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		Dinsos P3A
389	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		Dinsos P3A
390	Jumlah cadangan pangan		Dinas Pertapan
391	Jumlah kebutuhan pangan		Dinas Pertapan
392	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		Dinas Pertapan
393	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		Dinas Pertapan
394	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal		Dinas Pertapan
395	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang		Dinas Pertapan
396	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		Dinas Pertapan
397	Tertanganinya kerawanan pangan		Dinas Pertapan
398	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		Dinas Pertapan

399	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		Dinas Pertapan
400	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi		PUPR
401	Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi		PUPR
402	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota		PUPR
403	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		PUPR
404	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee		PUPR
405	Dokumen Izin membuka tanah		PUPR
406	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota		PUPR
407	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		PUPR
408	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		PUPR
409	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas ijin lokasi		PUPR
410	Luas ijin lokasi yang diterbitkan		PUPR
411	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha		PUPR
412	Jumlah penerima tanah obyek landreform		PUPR
413	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah		PUPR
414	Luas izin membuka tanah yang diterbitkan		PUPR
415	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani		PUPR
416	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		PUPR
417	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kabupaten		PKPLH
418	Total volume sampah yang dapat ditangani		PKPLH
419	Total volume timbunan sampah kabupaten/kota		PKPLH
420	Rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah		PKPLH
421	Kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah		PKPLH
422	Jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan		PKPLH
423	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten		PKPLH
424	Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan		PKPLH
425	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		PKPLH
426	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		PKPLH

427	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota		PKPLH
428	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		PKPLH
429	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat		PKPLH
430	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/ kota yang ditangani		PKPLH
431	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP		Dispendukcapil
432	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		Dispendukcapil
433	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan		Dispendukcapil
434	Peristiwa perkawinan yang dilaporkan		Dispendukcapil
435	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan		Dispendukcapil
436			
437	Peristiwa perceraian yang dilaporkan		Dispendukcapil
438	Jumlah akta kematian yang diterbitkan		Dispendukcapil
439	Peristiwa kematian yang dilaporkan		Dispendukcapil
440	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam satu tahun		Dispendukcapil
441	Jumlah anak usia 0-17 tahun krang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA		Dispendukcapil
442	Jumlah anak usia 0-17 tahun		Dispendukcapil
443	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir		Dispendukcapil
444	Jumlah anak usia 0-18 tahun		Dispendukcapil
445	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama		Dispendukcapil
446	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun		Dinas PMD
447	Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n)		Dinas PMD
448	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Dinas PMD
449	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Dinas PMD
450	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Dinas PMD
451	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Dinas PMD
452	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun		Dinas PMD
453	Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)		Dinas PMD
454	Angka kelahitan total (TFR)		Dinkesdalduk KB

455	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Dinkesdalduk KB
456	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		Dinkesdalduk KB
457	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		Dinkesdalduk KB
458	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		Dinkesdalduk KB
459	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Dinkesdalduk KB
460	Jumlah peserta KB aktif		Dinkesdalduk KB
461	Jumlah pasangan usia subur		Dinkesdalduk KB
462	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		Dinkesdalduk KB
463	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Dinkesdalduk KB
464	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif		Dinkesdalduk KB
465	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		Dinkesdalduk KB
466	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		Dinkesdalduk KB
467	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)		Dinkesdalduk KB
468	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota		Dinas Perhubungan
469	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C		Dinas Perhubungan
470	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun		Dinas Perhubungan
471	Jumlah kendaraan yang wajib uji		Dinas Perhubungan
472	Jumlah penetapan tariff lintas penyeberangan		Dinas Perhubungan
473	Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota		Dinas Perhubungan
474	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota		Dinas Perhubungan
475	Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten/kota		Dinas Perhubungan
476	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota		Dinas Perhubungan
477	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Diskominfo
478	Jumlah layanan public diselenggarakan secara online dan terintegrasi		Diskominfo
479	Jumlah layanan publik		Diskominfo
480	<i>Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015</i>		Diskominfo
481	<i>Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah</i>		Diskominfo
482	<i>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</i>		Diskominfo

483	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</i>		Diskominfo
484	<i>layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</i>		Diskominfo
485	<i>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</i>		Diskominfo
486	<i>Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i>		Diskominfo
487	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		Diskominfo
488	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		Diskominfo
489	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		Diskominfo
490	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		Diskominfo
491	Jumlah data yang dapat berbagi pakai		Diskominfo
492	Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah		Diskominfo
493	perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city		Diskominfo
494	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		Diskominfo
495	Jumlah ASN pengelola TIK		Diskominfo
496	<i>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota</i>		Diskominfo
497	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi		Diskominfo
498	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		Diskominfo
499	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		Diskominfo
500	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset		Dinas Komidag
501	Jumlah seluruh koperasi		Dinas Komidag
502	<i>Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan</i>		Dinas Komidag
503	<i>Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam</i>		Dinas Komidag
504	<i>Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</i>		Dinas Komidag
505	<i>Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</i>		Dinas Komidag
506	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi		Dinas Komidag
507	Jumlah koperasi yang ada		Dinas Komidag
508	<i>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya</i>		Dinas Komidag
509	<i>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada</i>		Dinas Komidag
510	<i>Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian</i>		Dinas Komidag

511	<i>Jumlah anggota koperasi yang ada</i>		Dinas Komidag
512	<i>Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian</i>		Dinas Komidag
513	<i>Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan</i>		Dinas Komidag
514	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)		Dinas Komidag
515	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan		Dinas Komidag
516	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran		Dinas Komidag
517	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kielembagaan dan usaha		Dinas Komidag
518	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan		Dinas Komidag
519	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha		Dinas Komidag
520	Jumlah usaha mikro keseluruhan		Dinas Komidag
521	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		Dinas Komidag
522	Jumlah wirausaha yang ada		Dinas Komidag
523	jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)		Dinas Komidag
524	jumlah usaha mikro yang bermitra		Dinas Komidag
525	jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha		Dinas Komidag
526	jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk usaha		Dinas Komidag
527	jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran		Dinas Komidag
528	jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran		Dinas Komidag
529	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan		Dinas Komidag
560	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan		Dinas Komidag
561	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota		DPMPTSP
562	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor		DPMPTSP
563	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun		DPMPTSP
564	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting		DPMPTSP
565	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal		DPMPTSP
566	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal		DPMPTSP
567	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal		DPMPTSP
568	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan		DPMPTSP
569	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota		DPMPTSP
570	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal		DPMPTSP

571	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal		DPMPTSP
572	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima		DPMPTSP
573	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota		Dinas Dikpora
574	Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota		Dinas Dukcapil
575	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Dinas Dikpora
576	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Dinas Dikpora
577	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kabupaten/kota		Dinas Dikpora
578	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Dinas Dikpora
579	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Dinas Dikpora
580	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		Dinas Dikpora
581	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		Dinas Dikpora
582	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		Dinas Dikpora
583	<i>Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>		Dinas Kominfo
584	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Dinas Kominfo
585	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Dinas Kominfo
586	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Dinas Kominfo
587	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Dinas Kominfo
588	<i>Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral</i>		Dinas Kominfo
589	<i>Jumlah kegiatan statistik sektoral</i>		Dinas Kominfo
590	Jumlah metadata indicator statistic sektoral		Dinas Kominfo
591	Jumlah indicator statistic sektoral		Dinas Kominfo
592	<i>Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</i>		Dinas Kominfo
593	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
594	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
595	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
596	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan wilayahnya		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
597	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

598	Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
599	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
600	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
601	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
602	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
603	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
604	<i>Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
606	<i>Jumlah seluruh arsip aktif</i>		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
607	<i>Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
608	<i>Jumlah seluruh arsip inaktif</i>		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
609	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
610	<i>Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</i>		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
611	<i>Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi</i>		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
612	Jumlah nilai per area keamanan informasi		Dinas Kominfo
613	Jumlah area penilaian		Dinas Kominfo
614	<i>Jumlah kegiatan strategis teramankan</i>		Dinas Kominfo
615	<i>Jumlah kegiatan strategis yang ada</i>		Dinas Kominfo
616	Jumlah SE (Sistem Elektronik) yang menerapkan SMKI atau aplikasi penyandian		Dinas Kominfo
617	Jumlah SE yang ada dan diamankan sertifikat elektronik		Dinas Kominfo
618	<i>Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</i>		Dinas Kominfo
619	Jumlah SE yang ada		Dinas Kominfo
620	Jumlah titik teramankan		Dinas Kominfo
621	Jumlah titik pada PHKS (Pola Hubungan Komunikasi Sandi)		Dinas Kominfo
622	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
623	Jumlah cagar budaya yang terdata		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

624	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
625	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
626	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
627	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
628	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
629	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
630	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
631	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
632	Jumlah CB dimanfaatkan		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
633	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
634	Jumlah pengunjung museum		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
635	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
636	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
637	Jumlah pembentukan tim ahli CB		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
638	Jumlah ahli CB yang disertifikasi		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
639	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
640	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
641	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
642	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
643	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)		Dinas Perikanan
644	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		Dinas Perikanan
645	<i>Jumlah TPI yang operasional</i>		Dinas Perikanan
646	<i>Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota</i>		Dinas Perikanan
647	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan		Dinas Perikanan
648	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan)		Dinas Perikanan

	usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		
649	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun		Dinas Perikanan
650	Jumlah wisatawan tahun n		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
651	Jumlah wisatawan n-1		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
652	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
653	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
654	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
655	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
656	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
656	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
657	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
658	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
659	Jumlah tenaga kerja pariwisata		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
660	Jumlah peserta pembekalan sector kepariwisataan		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
661	Jumlah sasaran pembekalan sector kepariwisataan		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
662	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
663	Jumlah kamar yang terjual		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
664	Jumlah kamar yang tersedia		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
665	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		BPS
666	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
667	Jumlah produksi pertanian pangan per ha per tahun		Dinas Pertanian
668	Luas panen		Dinas Pertanian
669	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		Dinas Pertanian
670	Prasaran pertanian yang digunakan		Dinas Pertanian
671	Penerbitan izin usaha pertanian		Dinas Pertanian
672	Jumlah prasarana yang aktif digunakan		Dinas Pertanian
673	Jumlah prasarana yang dibangun		Dinas Pertanian
674	Jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota		Dinas Pertanian
675	Jumlah usulan usaha pertanian yang difasilitasi		Dinas Pertanian
676	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t)		Dinas Pertanian
677	Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya		Dinas Pertanian

678	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan		Dinas Komidag
679	Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota		Dinas Komidag
680	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan kurang dari 5 hari		Dinas Komidag
681	<i>Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar</i>		Dinas Komidag
682	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan kurang dari 5 hari kerja		Dinas Komidag
683	Jumlah permohonan izin took swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		Dinas Komidag
684	Jumlah penerbitan TDG kurang dari 5 hari kerja		Dinas Komidag
685	Jumlah permohonan penerbitan TDG		Dinas Komidag
686	Jumlah gudang yang ada di kab/kota		Dinas Komidag
687	<i>Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit kurang dari 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i>		Dinas Komidag
688	Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		Dinas Komidag
689	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota		Dinas Komidag
690	Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer		Dinas Komidag
691	Jumlah penerbitan SKA yang tepat waktu		Dinas Komidag
692	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok		Dinas Komidag
693	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		Dinas Komidag
694	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan		Dinas Komidag
695	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah kab/kota		Dinas Komidag
696	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam ketentuan yang berlaku		Dinas Komidag
697	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan		Dinas Komidag
698	Jumlah industry kecil dan menengah tahun n		Dinas Perinaker
699	Jumlah industry kecil dan menengah tahun n-1		Dinas Perinaker
700	Jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota		Dinas Perinaker
701	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan		Dinas Perinaker
702	Jumlah izin yang dikeluarkan		Dinas Perinaker
703	Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan		Dinas Perinaker
704	jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Dinas Perinaker

705	Jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan		Dinas Perinaker
706	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota		Dinas Perinaker
707	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota		Dinas Perinaker
708	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya		Dinas Perinaker
709	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Dinas Perinaker
710	Jumlah satuan pemukiman yang dibina		Dinas Perinaker
711	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		Bakeuda
712	Jumlah APBD		Bakeuda
713	Jumlah PAD		Bakeuda
714	Jumlah PDRB non Migas		BPS
715	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/ level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		Inspektorat
716	Opini Laporan Keuangan		Inspektorat
717	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n		Bagian Pengadaan
718	Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		Bagian Pengadaan
719	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		Bagian Pengadaan
720	Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif		Bagian Pengadaan
721	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan		Bagian Pengadaan
722	Total belanja langsung		Bakeuda
723	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas		BKD
724	Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah		BKD
725	<i>Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)</i>		BKD
726	<i>Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>		BKD
727	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi		BKD
728	Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		BKD
729	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi		Bakeuda
730	Total belanja APBD		Bakeuda
731	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi		Bakeuda
732	Total PAD dalam APBD		Bakeuda

733	Nilai realisasi Silpa		Bakeuda
734	Total belanja anggaran sebelumnya		Bakeuda

Blok V. Desain Kompilasi Produk Administrasi

5.1. Kegiatan ini dilakukan:

2

Hanya sekali - 1 → Lanjutkan ke R.5.3. Berulang - 2

5.2. Frekuensi penyelenggaraan kegiatan:

3

Bulanan - 1
 Triwulanan - 2
 Tahunan - 3
 Lainnya(sebutkan.....) - 4

5.3. Jenis data:

2

Series - 1
Cross section - 2
Series dan cross section - 3

5.4. Metode pengumpulan data:

2

Mengisi kuesioner sendiri (swacacah) - 1
 Dokumentasi - 2
 Lainnya(sebutkan.....) - 4

5.5. Cakupan wilayah data

- a) Cakupan wilayah data adalah cakupan wilayah dari data terbesar/terluas dalam kompilasi.

Cakupan wilayah data seluruh wilayah di Indonesia artinya seluruh wilayah Indonesia sampai kabupaten/kota tercakup dalam kompilasi.

Cakupan wilayah sebagian wilayah di Indonesia artinya hanya sebagian wilayah yang tercakup dalam kompilasi.

- b) Lingkari kode sesuai wilayah yang digunakan.

5.6. Wilayah data

- a) Wilayah data diisi hanya jika kode 2 pada R.5.7 dilingkari.

- b) Tuliskan seluruh wilayah yang menjadi cakupan data kompilasi.

Blok VI. Pengumpulan Data

6.1. Petugas pengumpulan data

Lingkari kode sesuai jenis petugas pengumpulan data yang digunakan.

Pemilihan kode bisa lebih dari satu (*multiple choice*).

6.2. Persyaratan pendidikan terakhir petugas pengumpulan data

Lingkari kode sesuai pendidikan terendah petugas pengumpulan data yang dipersyaratkan.

6.3. Jumlah petugas pengumpulan data

Tuliskan jumlah petugas pengumpulan data yang digunakan meliputi supervisor/penyelia/pengawas dan enumerator/kompilator/pengumpul data.

5.5. Cakupan wilayah data:

2

- Seluruh wilayah di Indonesia - 1 → Lanjutkan ke Blok VI
- Sebagian wilayah di Indonesia - 2

5.6. Wilayah data:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Jawa Timur	Trenggalek

Blok VI. Pengumpulan Data

6.1. Petugas pengumpulan data:

1

- Staf - 1
- Tenaga kontrak - 2
- Lainnya (sebutkan) - 4

6.2. Persyaratan pendidikan terakhir petugas pengumpulan data:

2&3

- SMP - 1
- SMA/SMK - 2
- Akademi/Universitas - 3

6.3. Jumlah petugas pengumpulan data:

- Supervisor/penyelia/pengawas : 1 orang
- Enumerator/kompilator/pengumpul data : 3 orang

6.4. Apakah melakukan pelatihan petugas pengumpulan data?

Lingkari kode 1 jika melakukan pelatihan petugas pengumpulan data dan kode 2 jika tidak melakukan pelatihan petugas pengumpulan data.

Blok VII. Pengolahan, Estimasi, Analisis, dan Diseminasi Data

7.1. Metode pengolahan

a) Metode pengolahan meliputi:

1. Penyuntingan (*editing*), yaitu kegiatan pemeriksaan hasil pengumpulan data. Penyuntingan dilakukan pada kesalahan dan ketidakkonsistenan pengisian rincian pertanyaan.
2. Penyandian (*coding*), yaitu kegiatan pemberian kode pada setiap rincian pertanyaan. Penyandian dilakukan untuk memudahkan *input* data.
3. *Input* data (*data entry*), yaitu kegiatan memasukkan data ke dalam *database* melalui formulir *data entry*. *Input* data dilakukan dengan menggunakan aplikasi, seperti Ms. Excel atau aplikasi buatan sendiri.
4. Penyahihan (validasi), yaitu kegiatan pemeriksaan dan perbaikan data hasil *input* data.

b) Lingkari kode 1 jika menggunakan dan kode 2 jika tidak menggunakan metode pengolahan

7.2. Metode analisis

a) Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis meliputi:

1. Analisis deskriptif, yaitu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data menggunakan metode statistik sederhana, seperti *mean*, *median*, *Modus*, *range*, *variance*, standar deviasi, tabel kontingensi, dan analisis kuadran.
2. Analisis inferensia, yaitu analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pada sampel dan digunakan untuk generalisasi populasi. Kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode statistik yang lebih mendalam, seperti anova, korelasi, regresi, *chi-square*, faktor, *cluster*, dan diskriminan.

b) Tuliskan metode analisis yang digunakan.

7.3. Unit analisis

a) Unit analisis adalah unit yang akan dianalisis. Unit analisis, unit sampel, dan unit observasi bisa sama dan bisa berbeda.

b) Tuliskan unit analisis yang digunakan.

7.4. Tingkat penyajian data

Lingkari kode sesuai tingkat penyajian data yang diharapkan.

7.5. Produk data yang tersedia untuk umum

a) Produk data yang tersedia untuk umum adalah produk data dari kegiatan statistik yang didiseminasikan/disebarluaskan kepada masyarakat umum. Bentuk produk data meliputi:

1. Media cetak, yaitu produk data yang dipublikasi dalam bentuk buku atau publikasi tercetak.
2. Media elektronik, yaitu produk data yang dipublikasikan dalam bentuk file elektronik/*softcopy* publikasi.

b) Lingkari kode 1 jika menghasilkan dan kode 2 jika tidak menghasilkan produk data.

7.6. Rencana penerbitan publikasi untuk umum

Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun rencana penerbitan publikasi hasil kegiatan yang dilakukan. Yang dimaksud dipublikasikan untuk umum adalah publikasi yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk tabel/grafik yang ditampilkan di *website*, serta poster/spanduk yang ditempel di jalan umum atau ruang publik di kantor. Apabila kompilasi hanya menghasilkan laporan terbatas pada level tertentu dari penyelenggara kompilasi maka tidak termasuk sebagai publikasi untuk umum.

